

## BAB III

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Daerah Patani

Jumlah penduduk Muslim di negara Thailand adalah sekitar 15 persen, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penganut Budhayang jumlah sekitar 80 persen. Mayoritas penduduk yang Muslim ini tinggal di Selatan Thailand, khususnya di provinsi Patani, Yala dan Narathiwat. Tiga Provinsi ini sangat mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Ini dikarenakan tradisi Muslim di wilayah ini telah mengakar sejak zaman kerajaan Sri Vijaya yang menguasai Wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand Selatan.<sup>1</sup>

##### 1. Keadaan Geografis dan Demografis

Thailand Selatan letaknya di Semenanjung Tanah Melayu, yang dahulu dikenal dalam sejarah sebagai Semenanjung Emas. Kawasan Selatan yang berbentuk semenanjung itu terletak diantara garis lintang  $11^{\circ} 42' - 5^{\circ} 37'$  dan garis bujur  $98^{\circ} - 102^{\circ}$ .<sup>2</sup> Bentuk buminya adalah bujur memanjang yang panjangnya dari Utara ke Selatan sejauh 600 km. Lebarinya pula, di kawasan yang paling luas ialah 250 km dan yang paling sempit 64 km. Keluasan bumi di Selatan ialah 70.715.15 km persegi yaitu 13.78 % daripada keseluruhan bumi di Thailand.<sup>3</sup>

Thailand Selatan terdiri dari lima provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat, Sartun, dan Songkhla, dengan total penduduk 6.326.732.<sup>4</sup> Mayoritas penduduk Muslim berdiam di empat provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat dan Setun, yaitu sekitar 14% di perkotaan, dan 86% di pedesaan.<sup>5</sup> Sedangkan di Songkhla, Muslim sekitar 19%, (minoritas), sementara umat Buddha 76.6% . Mayoritas penduduk yang Muslim

---

<sup>1</sup>Helmiati, *Sejarah Asia Tenggara*, (Yogyakarta:Nusa, Media, 2011), h. 231-232.

<sup>2</sup>(Staban Taksin 1986.)

<sup>3</sup>*Office of the prime Minister* 1980

<sup>4</sup>Kantor Statistik Nasional, Thailand, 2002.

<sup>5</sup>(Ycci, 2006: 34).

berbahasa Melayu, rata-rata 70 persen mereka tinggal di tiga provinsi, yakni : Pattani, Yala dan Narathiwat, sementara penduduk berbahasa China yang tinggal di provinsi-provinsi itu adalah : 0.3%, di Narathiwat, 1.0%, di Pattani, dan , 3.0% di Yala .<sup>6</sup>

Songkhla adalah propinsi terbesar di Thailand Selatan Wilayah ini memiliki bandara internasional dan menjadi pusat perdagangan di Wilayah Selatan Thailand. Di kota provinsi ini, masyarakat Buddha etnis Thai kebanyakan tinggal, dan meskipun mereka minoritas di daerah itu, namun mereka termasuk kelompok ekonomi menengah dan memiliki profesi sebagai pegawai pemerintah atau pengusaha.

Selama masa integrasi, Patani adalah istilah untuk 4 (empat) provinsi yang penduduknya adalah mayoritas Muslim. Disini, masyarakat Thai Buddhis mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan mendominasi sebagai pemimpin utama dalam lembaga-lembaga pemerintah Thailand Selatan. Selain masyarakat Buddhis Tai, adapula etnis minoritas lain, yaitu China, yang kebanyakan tinggal di perkotaan dan berprofesi sebagai pedagang. Mereka umumnya tinggal di kawasan 'peCinan' tepatnya di Kabupaten Betong, provinsi Yala. Sementara penduduk etnis Thai di pedesaan kehidupan ekonomi dan profesi mereka sama dengan kebanyakan Muslim, yakni sebagai petani, nelayan, atau pedagang kecil.

## 2. Aspek-aspek Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Agama

### a. Aspek Pendidikan

Sejak Islam datang dan berkembang di Selatan Thailand, pendidikan agama Islam telah banyak dilakukan di kalangan masyarakat Islam khususnya dalam bentuk pengajian Al-quran yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap anggota masyarakat. Kegiatan pengajian ini dilaksanakan di masjid, di madrasah atau di rumah-rumah guru ngaji yang terdapat di setiap kampung. Guru al-Quran, yang di

---

<sup>6</sup> Sensus Penduduk, Thailand, 2000)

daerah itu dipanggil “Tok Guru al-Quran”, mendapat penghormatan yang tinggi dalam masyarakat. Mereka mengajar dengan suka rela tanpa mengharap bayaran. Tulisan Melayu yang dikenali dengan tulisan Jawi adalah tulisan yang digunakan di kalangan masyarakat Islam di Selatan, dahulu dan sekarang.

Selain dari tempat-tempat belajar al-Qur’an sebagaimana disebut di atas, pendidikan Al-quran juga dilaksanakan di pondok-pondok pesantren. Di wilayah Selatan, pondok menjadi institusi pendidikan terpenting dan bahkan telah menjadi pusat pendidikan Agama yang terbesar di kawasan Selatan, termasuk di semenanjung tanah Melayu. Pondok telah menjadi model pendidikan yang memperoleh sambutan yang hangat dari masyarakat di Wilayah Selatan.

Selain berperan sebagai wadah institusi pendidikan yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Pondok juga berfungsi sebagai benteng dalam mempertahankan agama dan budaya penduduk Muslim setempat. Para pelajar pondok (santri) mengamalkan cara hidup sehari-hari secara bersama-sama dan seragam. Mereka sama-sama berkain sarung, berbaju Melayu, berkupiah putih dan sama-sama menggunakan tulisan Jawi dan buku-buku Jawi. Situasi inilah yang menjadikan pondok sebagai institusi yang mengikat masyarakat Islam di Selatan dan menyatukan mereka dalam suatu bentuk budaya tersendiri yang menampakan ciri ke Melayuan dan ke Islaman.

Pondok juga memiliki peranan yang sangat besar dalam memproduksi calon-calon pemimpin masyarakat. Mereka yang tamat dari pendidikan pondok umumnya dipilih sebagai pimpinan masyarakat, khususnya jawatan keagamaan seperti imam, khotib, bilal, ahli jawatan, kuasa masjid dan paling kurang menjadi tokoh lebai yang kedudukannya dihormati dalam masyarakat.

Di pihak lain, pendidikan kerajaan, yang berbentuk pendidikan formal, mulai diterapkan di tengah masyarakat Muslim di Selatan sejak pemerintahan Raja Culalunkon atau Rama , melalui pendirian sekolah di Patani pada tahun 1889. Pada mulanya, pendidikan formal kerajaan itu tidak mendapat sambutan yang positif di kalangan masyarakat Islam. Selanjutnya, pada tahun 1921, kerajaan mengeluarkan Undang-undang yang mewajibkan seluruh penduduk untuk bersekolah pada peringkat sekolah rendah mulai dari kelas satu hingga kelas empat. Walaupun undang-undang itu telah disosialisasikan, masyarakat Islam masih belum tertarik untuk mengirinkan anaknya bersekolah di lembaga pendidikan yang diciptakan oleh pemerintah itu. Menurut statistik tahun 1966, jumlah yang tamat kelas empat hanya 13.63% ini karena masyarakat masih terikat dengan pendidikan pondok.

Dalam menghadapi masalah ini, pada awal 1960-an lembaga pendidikan pondok diharuskan untuk didaftarkan sebagai institusi pendidikan kepihak kerajaan. Kemudian, pada tahun 1966, pemerintah kembali membuat peraturan bahwa setiap institusi pendidikan agama diwajibkan terdaftar di kerajaan di bawah akta sekolah swasta yang mengajar Agama Islam. Sejak itu perkembangan pendidikan di wilayah Selatan mengalami perubahan, dari yang semula berupa pondok yang bebas beralih menjadi madrasah yang sistematis.

Dalam praktek, Madrasah (Sekolah Agama) menjadi institusi pendidikan gabungan antara Agama dengan non agama. Guru non agama dikirim oleh pihak kerajaan untuk mengajar di sekolah Agama. Kerajaan memberibantuan keuangan tahunan kepada sekolah-sekolah Agama yang mengikut syarat dan peraturan yang ditetapkan. Bantuan tahunan yang disebut *Udnun* diberikan berdasarkan pada jumlah pelajar yang belajar di setiap sekolah yang ada.

Pada akhir tahun 1970-an, sekolah Agama yang mempunyai dua aliran pendidikan mulai diminati masyarakat. Banyak para orang tua yang mengirimkan anaknya untuk belajar di sekolah-sekolah yang mempunyai dua aliran tersebut. Kebanyakan mereka beralasan karena sekolah-sekolah ini memiliki guru yang kompeten dan merupakan alumni dari sekolah sekolah ternama dan mempunyai dua aliran pendidikan. Akibatnya pondok dan sekolah kecil-kurang mendapat perhatian dan sebagian besar mengalami kemerosotan.

Kenyataan ini dapat dilihat dalam data statistik tahun 1981, hal mana menurut data itu di Patani terdapat sebanyak 349 buah sekolah swasta (Sekolah Agama Rakyat) yang terdaftar. Tetapi yang betul-betul menjalankan pendidikan dan pengajaran hanya 199 sekolah. Dari jumlah sebanyak 199 buah ini, hanya 77 sekolah saja yang menjalankan satu aliran pendidikan (Agama saja), sedangkan selebihnya, sebanyak 122 sekolah, melaksanakan sistem pendidikan ganda, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum.

Sejak awal 1980-an minat masyarakat terhadap sekolah Agama yang besar dan mempunyai dua aliran, makin besar. Hal ini bukan saja dikarenakan sekolah-sekolah tersebut memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, tenaga pengajarnya pun banyak yang merupakan lulusan luar Negeri yang dipanggil dengan sebutan ustaz. Sekolah-sekolah Agama yang demikian ini pada umumnya berpusat pada tiga wilayah yakni : Patani, Yala dan Narathiwat dengan jumlah pelajar rata-rata melebihi dari 1,000 orang.

Karena pesatnya perkembangan sistem pendidikan di 3 wilayah provinsi tersebut, maka para pelajar yang berada di luar provinsi banyak yang tertarik untuk menuntut ilmu di kota-kota tersebut. Kedatangan para pelajar dari luar provinsi ini selanjutnya memperkuat jalinan hubungan antar penduduk Muslim yang

tinggal di wilayah yang berlainan. Perkembangan ini menyebabkan pihak kerajaan mengambil perhatian khusus dengan mengadakan sukatan pelajaran pengajian Islam di sekolah kebangsaan dan juga pada tingkat Universitas.

Di luar dari institusi-institusi pendidikan yang telah diterangkan di atas, masih ada lagi institusi pendidikan Islam yang tidak formal dan di luar kawalan badan resmi kerajaan : yaitu pendidikan anak-anak dan pendidikan masyarakat umum. Kedua institusi pendidikan ini akhir-akhir ini mulai menampakkan kontribusinya yang besar dalam pembinaan pengetahuan agama Islam dalam masyarakat Islam di seluruh wilayah Thailand bagian Selatan.

Berbeda dengan institusi-institusi pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan yang baru ini justru dikelola oleh masjid dan banyak diminati oleh penduduk sekitar.

Sebagaimana pendidikan anak-anak, yang dinamakan “Tadikan” Pendidikan masyarakat umum berlangsung di masjid-masjid dalam bentuk majlis-majlis pengajian yang memiliki jadwal pertemuan yang tetap, baik secara mingguan, bulanan maupun tahunan. Forum-forum pengajian itu memiliki metode dan sistem tertentu yang mengacu kepada pendidikan luar sekolah.<sup>7</sup>

b. Aspek Ekonomi

Kawasan Selatan adalah suatu kawasan yang subur dan kaya dengan bahan-bahan mentah. Wilayah ini menjadi penyumbang utama bagi pendapatan Negara. Di wilayah Selatan Thai terdapat hutan yang sangat kaya dengan berbagai macam jenis kayu. Di wilayah itu pula terdapat berbagai bahan

---

<sup>7</sup> Ahmad Umar Chapakia, *Politik Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902-2002*, (Malaysia : University Kebangsaan Malaysia UKM, 2002), h. 39-42.

pertambangan terutama logam dan timah.. Selain dari itu, Wilayah Selatan ini juga menduduki posisi penting dalam memproduksi hasil pertanian, seperti tanaman padi dan getah. Sedangkan wilayah perairannya, yakni di laut Cina Selatan dan laut Andaman, merupakan wilayah terpenting yang menjadi sumber perikanan.<sup>8</sup>

Meski wilayah Selatan memiliki kekayaan dan sumber alam yang begitu melimpah, namun kedudukan ekonomi dan tingkat pendapatan dikalangan masyarakat Selatan masih sangat rendah dibanding dengan wilayah lain di seluruh Negara. Berdasarkan data statistik terakhir, pendapatan perkapita bagi penduduk wilayah songkhla adalah sebesar US\$ 579.74, Patani sebesar US\$ 315.70, Yala US\$ 604.65 Narathiwat US\$ 512.26.

Kehidupan ekonomi masyarakat Muslim yang tinggal di pulau-pulau kecil di perairan pantai laut Cina Selatan Timur dan laut Andaman di Barat, lebih memprihatinkan lagi. Di pulau-pulau itu, penduduk setempat menggantungkan hidupnya dengan bertani, berkebun atau menangkap ikan di laut. Para nelayan ini umumnya terdiri dari para nelayan kecil yang melibatkan keluarga sebagai tenaga kerja inti. Mereka mencari ikan dilaut dengan menggunakan perahu kayu yang ukuran panjangnya tidak lebih dari 10 meter dan menggunakan alat penangkap ikan secara tradisional. Jarak tempuh mereka pun sangat terbatas tidak melebihi 5km dari tepian pantai mengingat mesin yang mereka gunakan umumnya mesin yang berkekuatan 30cc.

Masalah utama yang dihadapi oleh nelayan di daerah ini adalah kehadiran kapal nelayan asing yang besar dan memiliki alat penangkapan modern yang datang dari kawasan Tengah dan Utara. Kapal-kapal besar

---

<sup>8</sup>*Ibid.* h.42.

itu masuk ke perairan ini dengan menggunakan alat dan cara yang dilarang oleh undang-undang. Mereka menggunakan pukat modern yang mampu menguras semua ikan-ikan yang ada di dalam laut, tanpa membedakan ikan-ikan yang besar ataupun kecil. Tidak jarang kapal itu juga menggunakan bom dan gas kimia yang mengancam kelestarian biota laut yang ada di wilayah tersebut. Menghadapi masuknya kapal-kapal asing ini, para nelayan setempat melakukan perlawanan, mulai dari menembaki kapal-kapal asing tersebut hingga melakukan aksi unjuk rasa, menuntut pemerintah untuk ikut andil dalam menindak kapal-kapal tersebut dan menghukum pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masalah lain yang juga melingkupi kehidupan para nelayan di wilayah ini adalah beban hutang kepada kaum pemodal yang kebanyakan keturunan Cina atau pun lembaga keuangan yang meminjamkan uang kepada mereka untuk membeli perahu dan alat-alat penangkap ikan lainnya. Beban-beban hutang itu menyebabkan pekerjaan dan kehidupan mereka terikat dan bergantung kepada kaum pemodal, yang sampai taraf tertentu ikut juga menentukan harga ikan yang mereka peroleh

Selain dari masalah-masalah di atas, masyarakat Patani juga menghadapi masalah lain yakni hadirnya sejumlah perusahaan ternak udang yang dimiliki oleh para pemodal asing yang masuk ke wilayah tersebut dengan cara menyewa atau membeli tanah di kawasan Patani. Berdirinya perusahaan-perusahaan ini telah mempersempit lahan penghidupan masyarakat yang menyebabkan sebagian mereka terpaksa pergi meninggalkan kampung halaman mereka dan berpindah ke daerah lain untuk mencari penghidupan yang baru. Banyaknya kaum perempuan yang bekerja dipabrik sardin yang dibuka dan dikelolakan oleh para pemodal asing berpengaruh pula bagi tradisi budaya masyarakat



setempat yang semula pekerja mandiri berubah menjadi buruh di perusahaan asing.

Di bidang pertanian, yang merupakan mata pencaharian masyarakat lokal yang tinggal di wilayah pedalaman, persoalan-persoalan tertentu pun menghadang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pekerjaan menanam padi yang secara umum masih dijalankan dalam bentuk tradisional, hampir sepenuhnya bergantung pada musim hujan. Hasil yang mereka peroleh dari pekerjaan ini pun sangat terbatas dan tidak mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Meski baru-baru ini pemerintah telah meluncurkan proyek pembangunan irigasi, namun masyarakat Islam memandang proyek-proyek itu dengan penuh curiga dan negatif, terutamanya terhadap langkah kerajaan yang memindahkan masyarakat Budha dari kawasan Tengah dan Utara ke wilayah-wilayah Selatan dan akhirnya membentuk koloni baru berupa perkampungan masyarakat Budha.

Sebenarnya ada juga sebagian masyarakat Patani yang menggeluti usaha perkebunan karet, namun karena lahan yang mereka miliki sangat sempit maka hasil yang diperoleh pun tidak begitu memadai. Akibatnya banyak di antara mereka justru memilih menjadi buruh di kebun karet milik orang Cina yang mempunyai banyak modal dan menggunakan teknologi baru.

Persoalan lain yang juga mengganggu fikiran masyarakat Muslim Thai Selatan khususnya yang berada di kawasan Sempadan adalah Kerajaan membuka areal hutan dan gunung yang ada di wilayah setempat dan merubahnya menjadi kawasan perkebunan karet. Lahan-lahan milik pemerintah di wilayah tersebut diberikan kepada penduduk, dimana tiap-tiap keluarga yang terpilih diberi tanah selebar *25rai* (4.5 hektar) untuk diolah menjadi kebun karet dan untuk mendirikan perkampungan yang

dinamakan *Nikhom*. Bagi masyarakat Muslim setempat, proyek ini lebih banyak unsur politis ketimbang manfaat ekonomisnya karena sebahagian besar tanah proyek itu dimiliki oleh masyarakat Budha yang datang dari luar daerah menjadi golongan dominan diperkampungan *nikhom* itu.

Kondisi dan situasi yang tidak kondusif inilah yang mendorong ratusan ribu anggota keluarga masyarakat Muslim Patani untuk berhijrah dari tempat mereka di Selatan, memasuki negara seperti Malaysia dan Arab untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

### c. Aspek Sosial

Penduduk Muslim di Thailand Selatan meski secara nasional minoritas, namun memiliki posisi penting dan strategis dalam menopang keamanan dan kestabilan politik pemerintahan di wilayah Selatan. Ini dikarenakan masyarakat-masyarakat Muslim umumnya berpusat di wilayah-wilayah perbatasan antara negara Thailand dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, yaitu di wilayah Pattani, yaja, Narathiwat, dan Stul.

Dari sisi sosiologi, masyarakat di empat wilayah tersebut berada di kawasan desa, di tempat mana memiliki dan mempraktekkan tradisi dan budaya mereka sendiri, dengan ikatan sosial yang sangat kuat dan dipayungi oleh semangat kegotongroyongan yang tinggi khususnya dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan kepentingan bersama seperti mendirikan masjid dan sekolah..

Meski secara nasional masyarakat Muslim di negara Thailand merupakan kaum minoritas namun di wilayah Selatan, mereka adalah kelompok mayoritas dan menempati daerah-daerah tertentu. Bahkan di wilayah tertentu seperti di provinsi Sonkhla, wilayah di mana jumlah umat Islam hanya 20 % saja dari

total penduduk setempat, namun karena mereka berkelompok dan berpusat di wilayah tertentu, misalnya di *Jena, natewi, tepa, dan sebayo*, kondisi ini menjadikan mereka menjadi kelompok dominan di wilayah tersebut.

d. Aspek Agama

Fakta sejarah menunjukkan bahwa di bumi Selatan Thailand ini pernah berdiri sebuah negeri Islam yang dikenal dengan nama : Patani Darussalam. Negeri itu berdiri pada pertengahan abad ke 18, dan pada awal abad ke 19 ia kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam terbesar di Asia Tenggara.

Sebagai suatu negeri yang menjadi sentral kegiatan dakwah, negeri Patani telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyebaran Islam di Kawasan Asia Tenggara dan melahirkan ulama-ulama besar yang karya-karyanya sampai sekarang masih dapat ditemui.

Di lihat dari tipologi aliran keagamaan yang berkembang, Mayoritas Muslim Patani terdiri dari kaum Sunni yang bermazhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka merupakan penganut agama Islam yang taat dalam melaksanakan perintah agama. Nuansa-nuansa keagamaan dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam konteks hubungan antara individu dengan individu yang lain maupun hingga pengamalan nilai-nilai budaya masyarakat. Tempat-tempat ibadah senantiasa penuh oleh jamaah dan kegiatan-kegiatan pengajian agama pun terus berkembang dari waktu ke waktu. Fanatisme masyarakat terhadap agama Islam sangat tinggi sehingga setiap isu-isu yang berkaitan dengan agama muncul maka masyarakat langsung meresponnya secara intens. Sikap dan kecenderungan masyarakat yang responsif ini terkadang dimanfaatkan oleh para politisi untuk memperoleh

dukungan sosial atau untuk menopang kepentingan politis tertentu.<sup>9</sup>

Dari segi praktek pengamalan agama, masyarakat muslim Patani terbagi dalam 2 (dua) kecenderungan. Sebagian teguh melaksanakan tradisi keagamaan yang diwarisi secara turun menurun dari generasi terdahulu, sementara sebagian lagi, terutama kaum muda, lebih memilih mengamalkan agama secara murni tanpa dipengaruhi oleh tradisi ataupun budaya setempat. Kecenderungan yang terakhir ini muncul setelah banyak mahasiswa-mahasiswa Patani yang belajar di Timur Tengah pulang kembali ke kampung halamannya sambil membawa pemikiran dan pengetahuan keagamaan yang mereka peroleh selama belajar di luar negeri. Kepulangan mereka membawa pengaruh bagi pengamalan ajaran agama di Patani. Para pelajar ini sering mengkritik praktek-praktek pengamalan tertentu dan berupaya mendorong masyarakat untuk meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan yang mereka anggap tidak memiliki dasar syari'at yang jelas. Usaha para pembaharu ini kemudian memperoleh tentangan dari kelompok tradisionalis yang kemudian melahirkan dua jenis kecenderungan/ aliran yakni golongan Tua dan golongan Muda.

Pada sisi hubungan antar umat beragama, dapat dikatakan bahwa perbedaan agama, bahasa dan budaya antara masyarakat Melayu Patani yang mayoritas muslim dengan Masyarakat Buddhis Thai telah menciptakan sekat kultural yang kokoh dan sulit untuk ditembus. Masyarakat Muslim yang berada dalam posisi minoritas terkesan cenderung mengisolasi diri karena mengalami kesulitan dalam beradaptasi.

---

<sup>9</sup>*Ibid.* h. 45.

Ada sejumlah faktor yang mendorong mereka untuk mengambil sikap yang demikian; *Pertama*, karena kebanyakan mereka (terutama yang tinggal di daerah *rural* seperti Pattani, Yala dan Narathiwat) hanya dapat berbicara sedikit bahasa Thai atau tidak bisa sama sekali. Ini membuat mereka tidak mampu berkomunikasi dengan kaum Cina dan Thai Buddha. *Kedua*, berdasarkan keyakinan agama, kaum Melayu Patani secara militan menolak perilaku sosial yang berkaitan dengan kedua kelompok tersebut. Misalnya mereka tidak dibolehkan menghadiri perayaan agama lain atau menikah dengan penganut agama lain. *Ketiga*, ketakutan kaum Melayu Patani bahwa interaksi dengan Thai Buddhis akan mengakibatkan anak-anak mereka menerima budaya Thai melalui proses asimilasi dan berakibat terkikisnya tradisi Melayu serta nilai-nilai ajaran agama Islam yang telah hidup dan dipertahankan dalam masyarakat selama berabad-abad lamanya.

Masyarakat Buddhis Thailand dengan masyarakat Muslim Patani sepertinya memang sulit untuk dipadukan. Sebagaimana dimaklumi antara kedua agama itu memiliki ajaran yang bukan saja berbeda tetapi secara lebih jauh justru bertentangan secara diametral. Sebagai suatu contoh, agama Islam melarang umatnya untuk melakukan penyembahan kepada suatu dzat selain Allah, sementara ajaran Buddha justru menempatkan penyembahan arwah leluhur dan penguasa alam ghaib sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam tradisi penyembahan keagamaannya. Begitu juga dengan masalah makanan, agama Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi daging babi, sementara agama Buddha justru membolehkan. Dua contoh perbedaan di atas, ditambah masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain, membuat masyarakat Muslim Patani terpisah secara kultural dari mayoritas warga

Thailand, yang ini sedikit banyak ada pengaruhnya dalam pergaulan sosial sehari-hari.

## **B. Konflik antara Pemerintah Thailand dan Minoritas Muslim**

Konflik antara Pemerintah Thailand dengan warga minoritas Muslim di wilayah Selatan Thailand sebenarnya telah berlangsung cukup lama dan mengakar kepada berbagai macam aspek. Sejak negeri Patani secara definitif dimasukkan ke dalam kerajaan Thai oleh Raja Chulalongkorn atau Rama V pada tahun 1902, masyarakat Muslim negara tersebut mulai merasa gerah dan memiliki keinginan untuk keluar dari kekuasaan Kerajaan Thai atau bergabung dengan Malaysia yang ketika itu masih berada di bawah pemerintahan Inggris.<sup>10</sup>

Keinginan Masyarakat Patani untuk memisahkan diri dari kekuasaan Thailand dapat dikatakan wajar dan memiliki alasan yang kuat baik secara politis maupun kultural. Secara politis, di bawah pemerintahan Muangthai, yang menganut agama Buddha sebagai agama resmi negara, masyarakat Muslim Patani merasa diperlakukan tidak adil dan menempati posisi kedua sebagai kaum minoritas. Jauhnya jarak antara kota Bangkok yang merupakan pusat pemerintahan dengan daerah di mana mereka bertempat tinggal membuat mereka sering kali menemui kesulitan dalam berhubungan dengan birokrasi Negara dan pemerintahan. Letak geografis empat provinsi yang demikian ini, berikut ikatan-ikatan budayanya, kemudian membantu mempertebal perasaan keterasingan (alienasi) di kalangan mereka dan mengakibatkan proses asimilasi dan integrasi yang diharapkan oleh pemerintah menjadi sulit untuk tercapai.

Selain dari itu, tekanan terhadap kaum Muslim Thai yang terus menerus berlangsung, sebagian disebabkan oleh *self imposed*, sebagian juga disebabkan oleh tekanan

---

<sup>10</sup> Helmiati. *Op. Cit.*, h. 240.

orientasi komunikasi media, juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi proses alienasi politis terhadap masyarakat Patani. Televisi lokal dan beberapa stasiun radio di wilayah tersebut khusus untuk melayani pemirsa *native speaking* Thai. Siaran banyak menggunakan bahasa Thai dan mengfokuskan diri pada soal-soal yang menjadi kepentingan populasi Thai Buddhis dan Cina.<sup>11</sup>

Pada sisi kultural, baik dalam bentuk agama, bahasa dan budaya, minoritas Muslim Muangthai yang tinggal di Thailand Selatan, merasa diri mereka merupakan bagian dari bangsa Melayu, apalagi tempat tinggal mereka secara geografis berada di wilayah perbatasan dengan negara-negara Melayu Malaysia.

Sekat-sekat politis dan kultural inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan antara pemerintah Thailand dengan masyarakat Muslim Patani, yang kemudian tidak jarang berujung konflik baik dalam bentuk demonstrasi besar-besaran maupun dalam bentuk kritik-kritik terbuka.

Dalam banyak hal, Pemerintah Thailand nampak memiliki keinginan yang kuat untuk membuat masyarakat Muslim Patani menjadi tidak berdaya. Lewat berbagai kebijakan politik, Pemerintah mencoba menggeser peranan sekolah-sekolah Muslim dan mengganti dengan sekolah Thai serta menekan pengaruh bahasa Melayu Patani di kalangan muslim dengan memaksa mereka untuk menukar nama dengan nama lain yang bernuansa Thai. Perayaan-perayaan keagamaan Islam dilarang, dan ibu-ibu hamil dipaksa untuk melahirkan di rumah sakit yang secara keseluruhannya ditangani oleh tenaga medis beragama Buddha.

Kebijakan-kebijakan yang rasial ini sudah barang tentu selanjutnya mendapat tentangan keras dari sejumlah pemimpin/pemuka masyarakat Patani yang kemudian direspons oleh Pemerintah dengan aksi penangkapan,

---

<sup>11</sup>*Ibid.* h.242.

penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap sejumlah pemimpin agama dan pemimpin politik Muslim Patani. Berdasarkan catatan, konflik terbuka yang berlangsung sejak Januari 2004 antara Muslim Melayu dan Pemerintah Thai Buddha, telah menewaskan lebih dari 6.000 orang dan melukai sekitar 10,800 orang.<sup>12</sup>

### C. Upaya Perdamaian/Penyelesaian Konflik

Setelah beberapa tahun berjalan dan konflik antara Pemerintah dan Masyarakat Muslim Patani tidak juga kunjung menemui penyelesaian, bahkan justru telah menarik perhatian masyarakat internasional, maka Pemerintah Thailand pada tahun 1947 mengubah taktik dengan mendekati para pejuang dan Tokoh Muslim Patani seraya menawarkan perundingan damai dan menghidupkan kembali pembicaraan dengan Minoritas Muslim.

Menanggapi tawaran perdamaian tersebut, Kiyai Hai. Sulong Abdulqadir yang berasal dari kampung Anak Ru Patani, mengajukan 7 (tujuh) perkara permintaan perdamaian kepada pemerintah *Po Pibhunsungkran*, yaitu :

1. Pemerintah memperbolehkan pemilihan seorang ketua beragama Islam bagi empat wilayah yang dipilih oleh anak negeri dan memiliki kekuasaan penuh.
2. Pemerintah mengadakan pelajaran bahasa melayu di tiap-tiap sekolah bagi anak-anak yang berumur tujuh tahun sebelum mereka belajar bahasa Siam.
3. Hasil yang diperoleh dari empat Wilayah hendaklah dibelanjakan dalam wilayah tersebut saja.
4. 80% daripada kaki tangan kerajaan haruslah terdiri dari orang Islam.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Idris Saleh, Anggota Organisasi Mahasiswa, di tempat Kediaman beliau pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015.



5. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi.
6. Memisahkan Mahkamah Syariah dari jawatan Undang-undang Negeri serta mengadakan Undang-undang yang khas untuk memutus perkara-perkara yang menyangkut hukum Islam.
7. Mengiktiraf rakyat ditempat wilayah itu yang berketurunan Melayu.

Permintaan yang diajukan oleh Haji Sulong yang mewakili rakyat Patani ini ditolak oleh pemerintah kerajaan. Karenanya perundingan menjadi gagal dan konflik antara Pemerintah Thailand dengan Masyarakat Patani pun terus berlanjut.

Pada tahun 2004, kembali Pemerintah Thailand menawarkan perdamaian kepada para Pejuang Patani. Sebagai bukti bahwa Pemerintah serius untuk menciptakan perdamaian, Pemerintah berjanji akan membangun fasilitas keagamaan (Mesjid), pendidikan, dan menciptakan peluang kerja, serta melakukan pembangunan ekonomi jangka panjang di wilayah tersebut. Berdasarkan catatan Pemerintah pada tahun 2004-2005 pemerintah telah menggunakan anggaran dalam penyelesaian konflik sebanyak 9,000 juta Baht dan telah merencanakan sebanyak 78 proyek yang akan dilaksanakan dalam tempo dekat.<sup>13</sup>

Pembicaraan terhenti karena beberapa bulan berikutnya pemerintahan sipil dilanda kemelut politik yang hebat dan menimbulkan demonstrasi dimana mana, Puncaknya adalah Pengadilan memerintahkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk mundur pada tanggal 7 Mei 2013. Beberapa minggu kemudian militer merebut kekuasaan dalam suatu kudeta tidak berdarah yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2013.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Idris Saleh, Anggota Organisasi Mahasiswa, di tempat Kediaman beliau pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015.

Sejak kudeta 22 Mei, Pemerintah militer telah melakukan serangkaian *Kaos Merah* (lawan dari militer dan pembentukan birokrasi) dengan *Kaus Kuning* (kelompok penentang pemerintahan Yingluck dan kakaknya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra) sebelum menyelenggarakan pemilu yang direncanakan akan diadakan pada bulan Oktober tahun 2014.

Setelah satu tahun lebih terhenti akibat krisis politik, militer Thailand tampaknya mengubah perhatian ke Selatan. Dan mengumumkan akan memulai kembali pembicaraan perdamaian dengan pejuang Muslim di Thailand Selatan (Melayu Patani). Untuk itu Pemerintah Thailand membentuk sebuah tim rundingan perdamaian untuk menghidupkan kembali pembicaraan dengan pejuang Melayu tahun lalu yang tidak terlaksana dengan mengambil tempat di Malaysia pada hari Rabu tanggal 3 September 2014.<sup>14</sup> Pembicaraan yang ditengahi oleh Malaysia itu mengalami kemajuan. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mengatakan akan menunjuk anggota dan membuat tim untuk memimpin delegasi Thailand dengan melibatkan kelompok tentara, pengacara dan akademisi.<sup>15</sup>

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian perdamaian tersebut Pihak militer memberi peluang bagi 48 stasiun radio komunikasi yang ada di tiga provinsi Selatan untuk kembali mengudara selama bulan suci Ramadhan. Sementara Ribuan stasiun radio independen yang kritis mempertanyakan persoalan politik dan perdamaian di Thailand Selatan tetap tidak diizinkan beroperasi<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Hamad Doni kepala Kampung Sungai baru dan Bapak Muhammad. Di Kediaman masing-masing, pada tanggal 5 Agustus, Hari Rabu.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Yamanase Faoh kepala Daerah Sungai baru, di Kantor Kepala Daerah, pada tanggal 10 Agustus, Hari Senin.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kiyai Taufiq Zamri di Pondok Persantren Takbai, pada tanggal 16 Agustus 2015.

Dalam rangka meredakan konflik sekaligus membangun kembali segala sarana dan prasarana lingkungan, dan mengembalikan suasana aman seperti dulu baik disegi ekonomi, politik, dan sosial di wilayah konflik, pihak pemerintah telah melakukan sejumlah upaya penanganan paska konflik antara lain dengan meluncurkan sejumlah proyek-proyek pembangunan di wilayah Patani. Di antara proyek-proyek tersebut ada yang berupa pembangunan fasilitas-fasilitas keagamaan seperti masjid, fasilitas pendidikan (sekolah) dan irigasi, namun perdamaian yang hakiki di Bumi Patani masih belum terwujud sepenuhnya. Ini dikarenakan masyarakat Patani belum memperoleh otonomi penuh dari Pemerintah Thailand untuk menentukan nasib mereka sendiri dan melaksanakan pemerintahan secara mandiri pula.

Lebih dari itu, dari Pemerintah sendiri nampaknya belum sepenuhnya mempercayai komunitas Muslim terbukti dengan masih ditempatkannya 150,000 lebih tentara, polisi dan sukarelawan sipil bersenjata di berbagai tempat dalam wilayah tiga provinsi, berikut sejumlah pos pemeriksaan yang juga ditempatkan di jalan-jalan utama wilayah itu. Situasi ini justru membuat masyarakat Muslim menaruh rasa curiga ada apa sesungguhnya yang ada dalam benak Pemerintah dengan tetap mempertahankan keberadaan petugas berseragam di wilayah konflik tersebut.

Menanggapi proses perdamaian yang belum juga terwujud secara tuntas, banyak pemikir-pemikir politik memberikan komentar dan mengusulkan kepada Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengakhiri konflik dan mengembalikan suasana tenang, tertib dan damai, baik dalam kehidupan politik, ekonomi maupun sosial.

Di antara sekian komentar dan pemikiran itu, ada yang mendesak agar pemerintah segera menunjuk departemen serta jajaran yang berhubungan dengan penyelesaian konflik untuk segera bekerja dan mengambil

langkah-langkah konkrit agar konflik Pemerintah dan Minoritas Muslim dapat terselesaikan secara baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan bersama,<sup>17</sup>

Di antara langkah-langkah strategis yang diusulkan adalah : Pemerintah perlu segera menunjuk Kementerian Keamanan Negara yang berwenang dan bertanggungjawab langsung untuk menjadi sentral pelaksanaan tugas sekaligus berfungsi sebagai supervisor dalam mengawasi jalannya perdamaian. Pada saat yang bersamaan Pemerintah juga perlu memberi keleluasaan kepada pemerintah Daerah dan jajarannya untuk menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi independen, mengadakan manajemen yang berkualitas dengan tetap berpatokan kepada penyelesaian perdamaian secara adil dan memuaskan semua pihak.<sup>18</sup>

Begitu pula halnya dengan Kementerian pembangunan ekonomi dan sosial. Kementerian ini juga harus diberi tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program di bidang pembangunan ekonomi dan sosial dengan cara membangun fasilitas keagamaan (Mesjid), pendidikan Agama (pondok), menciptakan peluang kerja, merancang pembangunan ekonomi jangka panjang, dan mendekati para tokoh agama di wilayah tersebut. Kesimpulannya, segala bentuk pendekatan harus segera dilakukan untuk mempercepat terwujudnya penyelesaian konflik yang adil dengan mengikut sertakan masyarakat akar rumput agar kesepakatan perdamaian dapat tetap berlangsung lama.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Cheruwaiding Wok, Kepala kampung. Di Kediaman, pada tanggal 2 Agustus, hari Minggu.

<sup>18</sup>Boonkrom Dongbunsatharn, *The Las War's Chawalit Tongciyu* ,( Offess, : Bangkok Cet-1, 2005), h. 188.

<sup>19</sup>Bapak Taufiq